

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# Banyak Jalan Lingkungan Rusak

**K**omisi D DPRD DKI Jakarta menyebut, banyak jalan lingkungan di Jakarta yang harus diperbaiki. Mereka kerap mendapat keluhan dari masyarakat ketika merespon mengenai kinerja Dinas Bina Marga DKI Jakarta yang dianggap kurang optimal.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta kepada Dinas Bina untuk merealisasikan program kegiatan anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Perbaikan jalan lingkungan tidak hanya menambah estetika kota, tapi juga dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.

"Kami ini prioritas yang paling utama ini kan mereka, warga yang memang butuh sentuhan Pemda DKI, butuh sentuhan APBD. Jadi jangan hal yang kecil ngeles anggarannya sudah habis. Ini yang kami tidak mau," kata Ida pada Sabtu (27/8/2022).

Ida juga menyoroti lemahnya serapan APBD 2022 di Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Padahal, kata perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan ini, masih banyak warga yang menunggu perbaikan jalan.

Hingga bulan delapan tahun ini, Dinas Bina Marga baru menyerap APBD 25,7 persen. Ida menjelaskan, anggaran untuk Dinas Bina Marga di tahun 2022 sebesar Rp 2,56 triliun, namun sampai Selasa (23/8/2022) kemarin, serapan anggaran baru mencapai Rp 643 miliar atau 25,7 persen dari total

anggaran.

"Ya kondisi penyerapan masih kecil. Argumennya tidak jauh karena sudah lelang, tinggal pembayaran dan nanti ketika proyeknya sudah selesai baru dilakukan pembayaran, pasti itu argumennya. Kami berharap bahwa semua pekerjaan berjalan sesuai aturan dan dapat dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menjelaskan, belum meratanya perbaikan jalan yang dilakukan karena adanya basis data yang lemah.

Data yang dimaksud adalah kondisi keadaan wilayah yang diprioritaskan untuk dibangun atau memerlukan perbaikan dari tingkat RT, RW sampai ke Kelurahan.

"Jadi harusnya saat Musrenbang atau merespon memiliki data yang lengkap, jadi tahu prioritas (jalan) mana yang dibetulkan. Jadi, jangan sampai yang belum ada skala prioritas dikerjakan dulu, tapi yang prioritas nggak," kata Hari.

Selain itu, salah satu kendala belum meratanya pembangunan atau perbaikan jalan, dijelaskan Hari karena tumpang tindih kewajiban dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

Hari mencontohkan untuk perbaikan jalan lingkungan di kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta.

"Paling kami membantu dengan scrapping saja, tapi kalau dengan hotmix beton nggak bisa, kami nggak berani nanti bisa jadi temuan (dari BPK RI)," jelasnya. (faf)



simnews